



DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA

PRESS CABLE

NOMOR : 023/05022009  
HARI : KAMIS  
TANGGAL : 5 FEBRUARI 2009

DAFTAR ISI

		Halaman
<b>I.</b>	<b>INTERNASIONAL</b>	
1.	Warga Rohingya Tolak Pulang: Indonesia Tunggu Jaminan Negara Asal	3
2.	Kalla: Obama perintahkan Menlu Hillary ke RI	3
3.	Enam Negara Besar Khawatirkan Ancaman Iran	4
4.	RI Apresiasi Kebijakan Obama	5
<b>II.</b>	<b>NASIONAL</b>	
<b>A.</b>	<b>POLITIK</b>	
1.	Presiden SBY: Peristiwa Sumut Kembali ke Alam Gelap	6
<b>B.</b>	<b>EKONOMI</b>	
1.	Econit: Ada "Hidden Risks" Dalam Ekonomi Indonesia, Masyarakat Menanggung	6
2.	Stok Beras 2008 Tertinggi	7
3.	Ekonomi 2009 Hadapi Tekanan	8
4.	Indonesia Importir Terbesar Sapi Hidup Australia	9
<b>C.</b>	<b>SOSBUD</b>	
1.	Dubes Jepang: Orang Indonesia Unggul	9
2.	TENAGA KERJA: Penempatan Calon TKI Dilayani Dua Lembaga	10
<b>D.</b>	<b>HANKAM</b>	--
<b>E.</b>	<b>HUKUM</b>	--
<b>F.</b>	<b>OLAHRAGA</b>	--

	<b>G.</b>	<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	
	1.	DPR Belum Setujui Ratifikasi Konvensi Stockholm	11
	2.	Kebakaran Lahan Terindikasi Faktor Kesengajaan	12
<b>III.</b>		<b>ARTIKEL</b>	
	1.	Putin, Rusia, dan WEC (oleh Reynaldo de' Archellie)	12
<b>IV.</b>		<b>LAIN-LAIN</b>	--
<b>V.</b>		<b>EDITORIAL</b>	
	1.	Tragedi Manusia Rohingnya	15

**Jakarta, 5 Pebruari 2009**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**

## I. INTERNASIONAL :

### 1. **Warga Rohingya Tolak Pulang: Indonesia Tunggu Jaminan Negara Asal**

Para pengungsi Myanmar dari suku minoritas Rohingya menolak rencana pemulangan mereka ke daerah asal oleh Pemerintah Indonesia. Tidak terjaminnya keselamatan mereka di wilayah asalnya menjadi alasan utama penolakan tersebut.

Beberapa pengungsi yang berasal dari Myanmar ketika ditemui Kompas di dua lokasi penampungan sementara, yaitu di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Idi Rayeuk dan Kantor Camat Idi Rayeuk, Rabu (4/2), mengatakan, mereka sama sekali tidak berkeinginan untuk kembali ke negara asalnya. Mereka mengaku ingin mencari tempat yang lebih baik untuk mencari penghidupan.

Nurullah (20), salah satu pengungsi Myanmar, saat ditemui di ruang perawatan RSUD Idi Rayeuk menyatakan, dirinya tidak mau kembali ke kampung halamannya karena—selain faktor tidak tersedianya lapangan pekerjaan bagi suku minoritas oleh pemerintahan negara tersebut— faktor keselamatan diri menjadi pertimbangan utama.

Nurullah, yang mengaku sempat bekerja di Thailand, mengatakan, ketiadaan lapangan kerja di negara asalnya yang membuat dirinya terpaksa bekerja secara ilegal di Thailand. Meski sempat dikejar-kejar pihak otoritas Thailand, dia baru sekali ini ditangkap dan diusir secara bersama-sama dengan sekitar 1.200 orang dari suku yang sama oleh pemerintah negara tersebut.

Nurullah mengaku mengalami pemukulan di beberapa bagian tubuhnya saat menjalani masa tahanan dan pengusiran oleh aparat keamanan Thailand.

Hal senada dikatakan Rahmat, salah satu pengungsi Rohingya. Rahmat yang mengaku pernah tinggal di Malaysia selama beberapa tahun menyatakan, mereka akan mengalami kekerasan verbal dan fisik oleh pemerintah yang berkuasa apabila kembali ke kampung halamannya.

Dia menuturkan, sebagian besar pengungsi yang datang ke Indonesia adalah laki-laki. Menggunakan sembilan perahu, sekitar 1.200 orang asal suku Rohingya ini dilepaskan oleh aparat keamanan Thailand di lautan lepas.

Direktur RSUD Idi Rayeuk Edi Gunawan saat ditemui di kantornya menjelaskan, sampai saat ini terdapat 115 pengungsi yang telah mendapatkan perawatan darurat di rumah sakit tersebut. Sebanyak 45 orang sudah dibawa kembali ke tempat penampungan sementara di Kantor Camat Idi Rayeuk. Sampai saat ini masih sekitar 70 pengungsi yang mendapatkan perawatan di rumah sakit tersebut.

Komandan Pos Satuan Radar TNI Angkatan Laut Idi Rayeuk Letnan Dua Tedi Sutardi mengatakan, sampai saat ini belum ada perintah dari pimpinannya untuk memindahkan seluruh pengungsi Myanmar ke instalasi militer seperti yang terjadi di Sabang. "Semua sudah ditangani oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Timur," katanya.

#### **Persoalan logistik**

Di Jakarta, Juru Bicara Departemen Luar Negeri Teuku Faizasyah mengatakan, orang-orang Rohingya itu tetap harus dipulangkan ke tempat asal mereka. "Ada beberapa orang yang mengatakan sukarela untuk dipulangkan. Yang lain masih ragu-ragu. Bagi yang bersikeras, memang akan sulit menghadapinya, tetapi Indonesia tidak membuka diri untuk migran bermotif ekonomi," paparnya. Selain masih menunggu kepastian soal asal negara dan status orang-orang Rohingya itu, masih ada persoalan logistik menyangkut penampungan dan pemulangan mereka. "Kami tidak ingin persoalan ini berlarut-larut karena akan membebani pemerintah daerah dan pusat. Setelah mendapat jaminan perlakuan baik dari negara asal, kami siap memulangkan mereka," ujar Faiza. (Kompas)

### 2. **Kalla: Obama perintahkan Menlu Hillary ke RI**

Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan Presiden AS Barack Obama telah memerintahkan Menteri Luar Negeri Hillary Clinton untuk datang ke Indonesia pada awal menduduki jabatannya.

"Tadi Wapres Joe Biden mengatakan [kepada saya] sebenarnya rencananya Menlu AS Hillary Clinton hanya akan berkunjung ke China, Korea Selatan dan Jepang. Tapi Presiden Obama perintahkan, jangan lupa kunjungi Indonesia," kata Wapres Jusuf Kalla saat bertemu dengan masyarakat Indonesia di Wisma Indonesia, Washington DC, AS, Rabu malam atau Kamis pagi waktu Indonesia.

Wapres AS Joe Biden menceritakan perintah Presiden Obama itu saat menerima Wapres Jusuf Kalla di kantornya di West Wing Gedung Putih.

"Itu artinya Indonesia memiliki peran yang penting di kawasan Asia, dan pasti Indonesia akan jadi prioritas," kata Wapres.

Jusuf Kalla menjelaskan bahwa jika AS hanya mengutamakan China, Jepang maupun Korea Selatan maka Amerika Serikat tidak memiliki negara penyeimbang di Asia seperti Indonesia dan kondisi itu hanya akan menyulitkan Washington.

Menurut Wapres, AS dengan kepemimpinan Obama tentu memberikan perubahan yang berarti. "Sekarang tinggal bagaimana Amerika Serikat melakukan pendekatan dengan negara-negara Islam," kata Kalla.

Wapres mengatakan dengan kepemimpinan Presiden Obama maka telah terjadi perubahan besar di AS terutama dalam pendekatan hubungan dengan sejumlah negara Islam.

Jika sebelumnya di masa Presiden George W. Bush AS selalu menganggap negara lain, khususnya Islam, sebagai lawan, maka Presiden Obama justru mengubah pendekatannya sebagai kawan.

"Tapi ini tergantung bagaimana masyarakat Amerika Serikat dalam berhubungan dengan negara-negara Islam," kata Wapres.

Wapres Kalla juga mengemukakan bahwa keberadaan Presiden Barack Obama di Jakarta pada masa kecilnya bisa memberikan nilai positif bagi Indonesia. Namun, lanjut Kalla, hal itu tergantung kepada bagaimana pintar-pintarnya Indonesia memanfaatkan masa lalu Obama di Jakarta tersebut. (Bisnis Indonesia)

### **3. Enam Negara Besar Khawatirkan Ancaman Iran**

Para diplomat senior dari enam negara besar dunia Rabu ini bertemu untuk pertamakalinya dengan pemerintahan baru AS guna membicarakan ambisi nuklir Iran, dua hari setelah Iran meluncurkan satelit pertamanya.

Para direktur jenderal politik dari lima negara anggota permanen Dewan Keamanan PBB -- Inggris, China, Prancis, Rusia dan Amerika Serikat-- ditambah Jerman bertemu di Wiesbaden, dekat kota Jerman bagian barat, Frankfurt, demikian pemerintahan Berlin mengonfirmasikan kabar ini.

Para dirjen politik deplu keenam negara ini kemudian mengeluarkan keputusan bersama yang menyatakan mereka menyambut kesediaan pemerintah AS seperti dinyatakan Presiden Barack Obama untuk mengadakan pembicaraan dengan Iran.

Mereka menekankan komitmen bersamanya untuk menelurkan sebuah solusi diplomatik dan mendesak Iran untuk bekerjasama penuh dengan badan tenaga atom PBB yang berpusat di Wina, Badan Energi Atom Internasional (IAEA).

Dalam pernyataan bersamanya itu, mereka juga sepakat bahwa AS yang dalam pembicaraan itu diwakili Wakil Menteri Luar Negeri William Burns, akan berkonsultasi dengan mereka bagi langkah-langkah diplomasi selanjutnya setelah Washington melanjutkan pengkajian ulang kebijakannya terhadap Republik Islam Iran.

Kebersamaan keenam negara ini terbentuk dua hari setelah Iran membunyikan sirene peringatan dengan meluncurkan sebuah satelit orbit Bumi rendah ke luar angkasa, sebuah terobosan teknologi yang membuat Barat takut Teheran bakal menggunakannya untuk membawa kepala nuklir.

Iran menandakan bahwa satelit buatan sendiri pertamanya bernama Omid (Harapan) yang diluncurkan Senin itu, tidak ditujukan untuk tujuan militer, tetapi Washington sama sekali tidak menggubris penegasan Iran itu.

"Aksi ini tidak bisa meyakinkan kami bahwa Iran bertindak secara bertanggungjawab dalam memajukan stabilitas atau keamanan di kawasan (Timur Tengah)," kata Sekretaris Pers Gedung Putih Robert Gibbs kepada wartawan, Selasa.

"Upaya-upaya untuk mengembangkan kapabilitas peluncuran peluru kendali, upaya-upaya untuk melanjutkan sebuah program nuklir yang terlarang, atau ancaman-ancaman yang diciptakan Iran untuk diarahkan ke Israel dan sokongannya pada praktik teror, adalah sangat diprihatinkan oleh pemerintahan ini (Obama)," kata Gibbs.

Meskipun para dirjen politik enam negara besar itu menjaga kontak telepon dan email mengenai program nuklir Iran, pertemuan Rabu itu menandai pertemuan tatap muka pertama sejak Presiden Barack Obama berada ditampuk kekuasaan pada 20 Januari.

Barat menyangka Iran secara rahasia berusaha mengembangkan bom atom namun Republik Islam ini berkilah program nuklirnya adalah demi tujuan-tujuan damai dan menyatakan Iran berhak mengembangkan teknologi yang sudah dikuasai banyak negara itu.

Sebegitu jauh telah diambil pendekatan tongkat dan wortel (istilah diplomasi untuk menggambarkan ancaman dan persuasi) dengan menerapkan sanksi terhadap Iran sambil menawarkan

insentif ekonomi dan energi dengan balasan Iran tidak lagi memperkaya uranium, baik untuk senjata nuklir maupun untuk pembangunan tenaga listrik nuklir.

Hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan Iran dibekukan selama tiga dekade, namun Obama berjanji untuk menggelar masa depan baru dalam hubungan diantara mereka.

Dalam satu wawancara dengan jaringan televisi satelit Al-Arabiya minggu lalu, Obama mengatakan bahwa Washington menawari Iran dengan tangan terbuka asalkan para pemimpin Iran tidak lagi mengepalkan tangannya (mengancam negara lain).

Pendahulu Obama, George W. Bush, yang terkenal karena menyebut Iran sebagai bagian dari "poros kejahatan" menolak berunding dengan Teheran sampai negara itu menghentikan program energi nuklirnya yang sensitif itu.

Gedung Putih dibawah Obama telah menolak mengungkapkan opsi-opsi politiknya, termasuk serangan militer, untuk menghentikan Iran menguasai senjata nuklir.

Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad yang menyelamati Obama karena terpilih menjadi Presiden AS, muncul dengan sebuah pidato berapi-api Rabu lalu yang menuntut Obama mesti meminta maaf atas kejahatan-kejahatan AS terhadap Iran dan berhenti mendukung zionis Israel.

Masalah itu diperkirakan akan menjadi perdebatan panas dalam Konferensi Keamanan Munich akhir pekan ini yang akan dihadiri oleh Wakil Presiden AS Joseph Biden dan ketua parlemen Iran Ali Larijani.

Dalam komentarnya yang dipublikasikan Harian Sueddeutsche Zeitung, Rabu, Menteri Luar Negeri Jerman Frank-Walter Steinmeier menuntut Iran untuk mengambil peluang yang ditawarkan dari kesanggupan Obama untuk berbicara langsung dengan Iran. (ANTARA)

#### **4. RI Apresiasi Kebijakan Obama**

Wakil Presiden Jusuf Kalla (Wapres JK) mengapresiasi kebijakan Presiden Barack Obama terkait hubungan AS dengan negara-negara Islam. Wapres mengucapkan selamat kepada Presiden Obama.

Menurut Wapres, Obama telah mengembangkan arah baru dalam hubungan Amerika Serikat (AS) dengan negara-negara Islam dengan saling menguntungkan dan saling menghargai. "Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Presiden Barack Obama yang telah mengembangkan arah baru dalam hubungannya dengan negara-negara Islam," kata Wapres Kalla pada pidato di acara The 57th National Prayer Breakfast di Washington DC, AS, kemarin.

Wapres menyampaikan pidato berjudul "Mengukir Perdamaian di Indonesia, Penyelesaian dan Rekonsiliasi secara Damai". Acara The 57th National Prayer Breakfast tersebut diselenggarakan oleh Kongres AS setiap awal tahun dengan mengundang para tokoh dari berbagai negara yang memiliki kepedulian dalam bidang kemanusiaan dan perdamaian. Untuk tahun ini masalah perdamaian serta kemanusiaan menjadi fokus utama pertemuan.

Wapres diundang dalam acara tersebut karena dinilai telah menjadi tokoh kunci yang berperan aktif dalam berbagai penyelesaian konflik secara damai di Indonesia. Puncak acara The 57th National Prayer Breakfast akan dilakukan pada hari ini dan akan dihadiri langsung oleh Presiden AS Barack Obama. Dalam acara tersebut akan hadir ribuan tokoh nasional AS dan 500 tokoh dari seluruh dunia.

Dalam kesempatan ini Presiden Obama akan memberikan ucapan selamat satu per satu kepada para tokoh dunia yang diundang pada acara tersebut. Selesai menghadiri acara tersebut, Wapres JK akan bertemu dengan Wapres AS Joe Biden serta Direktur Intelijen Nasional AS Dennis Blair. Ikut mendampingi Wapres, Dubes RI untuk AS Sudjudnan Parnohadiningrat, Seswapres Tursandi, Musclisa Kalla, dan Din Syamsuddin.

Kunjungan Wapres selama dua hari di Washington akan diakhiri dengan melakukan pertemuan bersama masyarakat Indonesia di AS. Selanjutnya pada 6 Februari 2009, Wapres akan melanjutkan perjalanan menuju Den Haag, Belanda. Sebelumnya, dalam rangkaian kunjungan ke luar negeri kali ini, Wapres juga telah menerima gelar doktor kehormatan bidang perdamaian dari Universitas Soka, Tokyo, Jepang.

Wapres dinilai telah menyumbangkan tenaga, pikiran, dan waktu yang besar untuk mencari penyelesaian konflik secara damai melalui dialog dan negosiasi. Wakil Presiden Jusuf Kalla dan rombongan tiba di Amerika Serikat Selasa (3/2), setelah sebelumnya melakukan kunjungan ke Tokyo, Jepang.

Wapres meninggalkan Bandara Narita Jepang pada Senin (2/2) dan tiba di Amerika Serikat melalui Seattle untuk transit sebentar dan kemudian melanjutkan ke Minnesota. Rombongan Wapres

menginap semalam di Minnesota sebelum pagi harinya Selasa (3/2) terbang menuju ke Washington DC. (Koran Sindo)

## II. NASIONAL :

### A. POLITIK :

#### 1. **Presiden SBY: Peristiwa Sumut Kembali ke Alam Gelap**

PRESIDEN Susilo Bambang Yudhoyono menyebut peristiwa anarkis massa di Sumatera Utara (Sumut) yang menyebabkan tewasnya Ketua DPRD Sumut, AbdulAzis Angkat, sebagai kembalinya Indonesia ke alam gelap.

"Kalau sudah seperti itu kita menangis, kembali ke alam gelap, dilihat jelek oleh negara-negara lain," ujar Presiden dalam pidatonya pada kunjungan kerja ke PT Sinar Sosro, Bekasi, Kamis.

Presiden menekankan, pemerintah telah bekerja keras untuk memulihkan stabilitas sosial dan politik pasca krisis moneter 1998.

Saat itu, Presiden mengingatkan, banyak kerusuhan terjadi di beberapa wilayah Indonesia dan negara-negara sedunia memandang jelek Indonesia sebagai lautan anarki.

Untuk itu, ia meminta semua pihak agar tidak lagi mengganggu stabilitas sosial dan politik yang telah susah diciptakan dan dijaga.

"Kita bekerja siang malam memulihkan stabilitas sosial politik masyarakat. Dengan kerja keras kita, semua secara bertahap dapat dipulihkan. Ketika sedang dalam keadaan baik, jangan dirusak kembali," tuturnya.

Presiden Yudhoyono menyatakan keprihatinannya atas peristiwa di Gedung DPRD Sumut yang mengakibatkan meninggalnya Ketua DPRD Sumut, Abdul Azis Angkat.

"Satu jam setelah menerima berita itu, saya langsung menginstruksikan agar dilakukan sesuatu untuk mencegah bentrok yang lebih serius," ujarnya.

Presiden mengingatkan di alam keterbukaan pasca reformasi, menyalurkan aspirasi dan kebebasan berpendapat harus dilakukan sesuai dengan aturan tanpa aksi anarki.

Menjelang Pemilu 2009, Presiden berharap semua pihak dapat memelihara ketertiban dan keamanan sehingga suasana sosial politik tetap teduh dan damai.

"Sikap saya jelas. Saya hormati demokrasi, tetapi saya menentang anarki," ujar Kepala Negara. (Jurnal Nasional)

### B. EKONOMI :

#### 1. **Econit: Ada "Hidden Risks" Dalam Ekonomi Indonesia, Masyarakat Menanggung**

Lembaga kajian ekonomi Advisory Group in Economics, Industry, and Trade (Econit) menungkapkan adanya hidden risks (sejumlah resiko tersembunyi) dalam perekonomian Indonesia yang jika tidak diperbaiki maka masyarakat yang akan menanggung.

"Resiko-resiko itu tersembunyi karena adanya peningkatan ketertutupan informasi dan banyaknya rekayasa statistik, padahal ini jarang terjadi dalam ekonomi Indonesia di masa lalu," kata ekonom sekaligus pendiri Econit, Rizal Ramli di Jakarta, Rabu.

Ia menyebutkan, ada tiga resiko yang hingga saat ini masih tersembunyi yaitu resiko sektor perbankan, resiko di pasar modal, dan resiko rekayasa statistik.

Resiko perbankan mencakup resiko besarnya produk derivatif yang dijual oleh 15 bank dan nilai jatuh temponya mencapai 4 miliar dolar AS pada pertengahan 2009. Sementara total nilai transaksi hedging mencapai 70 miliar dolar AS, lebih besar dari cadangan devisa, yang menunjukkan besarnya faktor spekulasi di luar kebutuhan riil transaksi.

Resiko perbankan juga mencakup ketatnya likuiditas terutama untuk bank-bank menengah dan kecil. Nilai transaksi pasar uang antar bank juga sangat rendah, di mana transaksi hanya terjadi antara sesama bank besar atau sesama bank menengah kecil yang menunjukkan pasar uang antar bank sangat tersegmentasi.

"Resiko perbankan juga akan lebih besar pada 2009 karena peningkatan resiko kredit macet di sektor riil akibat penurunan ekspor, daya beli masyarakat, dan peningkatan PHK," kata Ramli.

Sementara itu resiko tersembunyi di pasar modal terutama akibat tingginya transaksi repo (gadai saham) dan transaksi margin, yaitu pemberian fasilitas pinjaman untuk pembelian saham.

"Kasus yang terjadi dalam kebangkrutan perusahaan sekuritas Sarijaya hanyalah contoh kecil dari gejala yang lebih besar," katanya.

Menurut dia, resiko-resiko yang tersembunyi itu dapat memicu pengkerutan lebih lanjut ekonomi Indonesia pada 2009.

"Resiko yang disembunyikan akan memperbesar masalah dan memperlambat upaya untuk memperbaikinya, pada akhirnya masyarakat yang akan menanggung resiko-resiko yang tersembunyi itu," kata Rizal Ramli.(ANTARA)

## **2. Stok Beras 2008 Tertinggi**

Bulog mengeksport beras jenis super dan premium 10 ton per bulan. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik (Perum Bulog) mencapai kinerja terbaiknya dengan menghimpun stok beras nasional pada 2008 sebanyak 3,2 juta ton dan menstabilkan harga makanan pokok masyarakat ini.

"Ketersediaan beras nasional sebanyak itu merupakan yang terbaik selama 10 tahun terakhir ini," kata Presiden Susilo Bambang Yudhoyono kepada pers usai melakukan inspeksi mendadak ke Kantor Pusat Perum Bulog, Jakarta, Rabu (4/2).

Presiden menilai Bulog berhasil menstabilkan harga beras nasional. "Ini perlu dicatat, saat harga beras dunia tidak stabil, Bulog justru mampu melakukan stabilisasi dengan harga rata-rata per tahun lebih rendah dari harga beras dunia."

Untuk melanjutkan keberhasilan tersebut, Presiden meminta Bulog mendalami kemungkinan mengendalikan distribusi minyak goreng dan gula putih agar harganya stabil.

"Kita akui adanya kesulitan dalam menstabilkan harga kebutuhan pokok karena adanya hukum pasar. Namun, kita tidak anut fundamentalisme pasar seperti itu dan selalu ada peran pemerintah," kata SBY.

Kepala Negara mengapresiasi keberhasilan Bulog dalam mencetak keuntungan tahun 2008 sebesar Rp80 miliar.

Membaihnya kinerja Bulog juga bisa dilihat dari kemampuannya mendistribusikan 300 ribu ton beras untuk rakyat miskin (raskin) dalam sebulan melalui 50 ribu titik di 80 ribu desa seluruh Indonesia. "Artinya, di setiap tiga desa terdapat dua titik distribusi. Pastikan hal itu di satu sisi efisien, dan di sisi lain mampu melayani distribusi raskin sampai pada yang berhak."

Presiden menyarankan penyaluran raskin mengantisipasi perkembangan iklim dan cuaca. Jangan ketika cuaca buruk, pemerintah bingung dalam hal penyalurannya. Pemerintah daerah juga harus melakukan langkah-langkah antisipasi yang baik.

"Bagi saya, apabila rakyat tidak terlambat memperoleh raskin tersebut, merupakan ukuran, apakah Bulog cukup mengantisipasi dan menyiapkan segalanya," kata Presiden.

Presiden mempersilakan Bulog mengembangkan berbagai model atau sistem penyaluran raskin, apakah melewati titik tertentu dan seterusnya daerah mendistribusikannya sampai pada rakyat yang berhak atau model mengembangkan warung-warung desa. "Saya persilahkan, koordinasi sebaik-baiknya dengan pemerintah daerah. Bagi saya, makin cepat, makin efisien, itulah model atau sistem yang baik."

Mengenai rencana ekspor beras, Presiden meminta Bulog untuk merencanakan dan mempersiapkannya dengan matang dan terus mengantisipasi perkembangan harga dan suplai beras dalam negeri dan harga beras dunia. Bila kebutuhan dalam negeri sudah tercukupi dan ada peluang untuk ekspor beras dalam jumlah dan jenis beras tertentu yang mendatangkan keuntungan ekonomi, rencana mengeksport beras bisa dilakukan.

SBY juga meminta Bulog menata kembali aset-asetnya yang tersebar di seluruh Indonesia agar semua fasilitas yang dimiliki tidak jadi beban, melainkan menjadi aset nasional yang memiliki nilai tambah. "Pengelolaannya harus transparan dan akuntabel."

Direktur Utama Perum Bulog, Mustafa Abubakar, mengatakan akan menindaklanjuti permintaan Presiden agar Bulog mendalami distribusi gula putih dan minyak goreng.

"Distribusi gula putih sudah kita lakukan pendalaman, bahkan Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan sudah memberikan persetujuannya. Sedangkan minyak goreng sesuatu yang baru dan akan kita mulai mendalami dengan antardepartemen terkait," kata Abubakar.

Abubakar mengatakan, Bulog akan mengeksport beras jenis super dan premium, sebab ekspor kedua jenis beras tersebut tidak akan mengganggu stok beras nasional. "Jumlahnya juga sedikit sekali, hanya 10 ribu ton per bulan atau sekitar 100 ribu ton per tahun."

Menurut dia, rencana tersebut penting untuk memberikan spekulasi efek pada petani dan pedagang, sehingga dapat memanfaatkan peluang pasar yang memiliki nilai komersial tinggi.(Jurnal Nasional)

### 3. **Ekonomi 2009 Hadapi Tekanan**

Perekonomian Indonesia 2009 dibayangi risiko pengerutan akibat anjloknya sejumlah indikator makroekonomi dalam negeri. Chairman Econit Advisory Group Rizal Ramli mengatakan, risiko tersebut terlihat dari pertumbuhan ekonomi 2009 yang diprediksi hanya 3,5%, jauh lebih rendah dari perkiraan pemerintah sebesar 5–6%."Tahun 2009 adalah tahun pengerutan," ujarnya pada Econit Economic Outlook di Jakarta kemarin.

Menurut Rizal, pengerutan terjadi setelah tiga indikator makroekonomi, yakni ekspor, investasi, dan konsumsi, mengalami penurunan. Ekspor diperkirakan menurun hingga 5%, atau merosot tajam dibandingkan pada 2006 yang tumbuh 17,8%, kemudian 2007 (13,1%), dan 2008 (20%). "Dominasi komoditas menyebabkan ekspor Indonesia menghadapi tekanan ganda akibat melemahnya permintaan atau turunnya harga komoditas," ujarnya. Pada investasi, tuturnya, kalangan investor akan menahan diri dalam menanamkan modal di dalam negeri, baik investasi portofolio maupun investasi langsung.

Tingginya risiko pasar modal saat ini dan kalah menariknya iklim investasi domestik dibanding beberapa negara Asia, mendorong kinerja investasi akan sulit untuk tumbuh. Rizal mengungkapkan, terdapat beberapa faktor lain penahan laju investasi tahun ini. Pertama, anjloknya harga komoditas tambang dan perkebunan sebagai sektor utama diminati investor selama ini.

Kedua, tingginya suku bunga kredit akibat ketatnya likuiditas perbankan. Ketiga, pemilihan umum yang membuat investor lebih bersikap menunggu. Adapun pada sisi konsumsi swasta, Rizal memproyeksikan penurunan pertumbuhan pada level 3,5%, jauh di bawah target pemerintah 5,4%.

Penurunan terjadi karena melambatnya daya beli karena tekanan inflasi dan gelombang pemutusan hubungan kerja sebagai imbas penurunan kinerja beberapa sektor yang banyak menyerap tenaga kerja seperti manufaktur, perkebunan, dan pertambangan. Sementara pengalokasian dana stimulus fiskal sebagai strategi pemerintah mengurangi dampak krisis, ungkap Rizal, tidak akan cukup efektif karena tidak tepat sasaran.

"Stimulus yang dirancang pemerintah, efek penggandanya bakal kecil. Sebab, porsi 81% untuk pengurangan pajak bagi kalangan menengah-atas," tuturnya. Menurut dia, pemerintah seharusnya lebih banyak mengalokasikan porsi dana stimulus untuk sektor-sektor padat karya dan dirasakan langsung efeknya oleh seluruh lapisan masyarakat.

"Pengeluaran langsung dalam bentuk stimulus untuk industri dan infrastruktur bakal mempercepat pemulihan ekonomi," tambahnya. Stimulus fiskal dengan memperbesar defisit hingga Rp132 triliun, lanjutnya, juga akan sangat rentan. Pasalnya, untuk menutup pelebaran defisit ini, pemerintah bakal memperbesar pembiayaannya dari utang luar negeri sekitar Rp82 triliun.

Jumlah utang bakal terus meningkat seiring pasar finansial belum pulih. Managing Director Econit Advisory Group Hendri Saparini menambahkan, tingkat efektivitas APBN sebagai stimulus perekonomian 2008 diragukan.

Pasalnya, berbagai asumsi di dalamnya tidak ditempatkan dalam kerangka krisis ekonomi yang lebih berat pada tahun ini. "Buktinya, hanya beberapa saat setelah disepakati pemerintah dan DPR, asumsi-asumsi makro kembali disesuaikan pemerintah," ujarnya.

#### **Sinergi DPR**

Saat berpidato dalam pembukaan Festival Ekonomi Syariah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap DPR dapat meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam pengimplementasian paket stimulus ekonomi.

"Agar semua kebijakan paket stimulus itu dapat segera diimplementasikan," tuturnya. Seperti diketahui, pemerintah telah mengajukan paket stimulus ekonomi senilai Rp71,3 triliun yang tercantum dalam APBN-P 2009, tetapi hingga kini belum mendapatkan persetujuan DPR.(Koran Sindo)

### 4. **Indonesia Importir Terbesar Sapi Hidup Australia**

Indonesia merupakan negara pengimpor terbesar sapi hidup Australia. Sepanjang 2008 sebanyak 651.196 ekor atau 75 persen dari total ekspor sapi hidup Australia ke pasar dunia yang tercatat 869.545 ekor. Impor Indonesia sepanjang 2008 itu naik 26 persen dari impornya tahun 2007 yang mencapai 516.992 ekor. Total nilai impor Indonesia itu mencapai 419 juta dolar Australia.

Dalam penjelasan persnya yang diperoleh ANTARA di Brisbane, Rabu, "Meat & Livestocks Australia" (MLA), perusahaan yang menjadi mitra industri peternakan dan pemerintah Australia ini, menyebutkan, Indonesia menjadi negara tujuan ekspor dan mitra dagang penting. Manajer Ekspor Ternak MLA, Michael Finucan, mengatakan, sapi-sapi hidup Australia sangat cocok dengan iklim Indonesia dan industri ternak negara itu serius membangun infrastruktur dan program kesejahteraan binatang.

Indonesia dinilai kalangan eksportir sapi hidup Australia sebagai pasar yang sangat potensial tidak hanya karena jumlah penduduknya yang besar tetapi juga karena dari sekitar 220 juta jiwa penduduknya itu, sekitar 20 juta orang di antaranya adalah orang-orang kaya.

Selain Indonesia, pasar utama sapi hidup Australia lainnya adalah Israel, Lybia, dan Rusia. Total ekspor sapi hidup Australia (2008) mencapai 869.545 ekor atau naik 150 ribu ekor dari total ekspor tahun 2007 yang tercatat 719.482 ekor. Dari hasil ekspor itu, Australia menerima devisa sebesar 644 juta dolar Australia. (Republika)

## **C. SOSBUD**

### **1. Dubes Jepang: Orang Indonesia Unggul**

Duta Besar Jepang untuk Indonesia Kojiro Shiojiri berpendapat, orang Indonesia mempunyai keunggulan.

Hal itu dia perhatikan dari orang Indonesia yang berkecimpung di perusahaan-perusahaan Jepang ataupun yang bergaul dengan masyarakat Jepang.

"Dan saya kira, Indonesia juga memiliki SDM (sumber daya manusia) yang berkualitas untuk menjadi pemimpin di dunia," kata Dubes Shiojiri saat melakukan kunjungan ke Sekolah Al-Azhar di Jakarta, Rabu.

Menurut Shiojiri, kunci dari keunggulan SDM adalah pendidikan. Oleh sebab itu sekolah-sekolah mendapatkan tempat yang luhur dalam institusi kenegaraan. "Saya rasa Indonesia dan Jepang juga mengutamakan pendidikan," katanya.

Didampingi Ketua Yayasan Pesantren Islam (YPI) Al-Azhar Zainulbahar Noor, Dubes Shiojiri lantas mamaparkan mengenai konstitusi Jepang, yang juga menekankan pentingnya masalah pendidikan.

Konstitusi Jepang, kata Shiojiri, menulis cita-cita dan tujuan pendidikan. Cita-cita pendidikan Jepang ada dua, pertama membangun negara Jepang yang demokratis dan berbudaya serta mengembangkannya; kedua, memberikan kontribusi pada perdamaian dan kesejahteraan dunia.

Sedangkan tujuan pendidikan Jepang, masih menurut Dubes, agar masyarakatnya sehat menuju masyarakat yang damai dan demokratis. "Sehat jiwa dan raganya," katanya.

Untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan tersebut, Dubes Shiojiri menyebut lima hal yang harus dilakukan. Pertama, mendapatkan ilmu dan pengetahuan, jiwa yang kuat dan moralitas yang sehat; kedua, menghormati nilai-nilai individual, kreativitas dan mandiri; ketiga, bertanggung jawab dan bisa bekerja sama satu sama lain; keempat, memberikan kontribusi terhadap alam dan lingkungan hidup; serta kelima, memelihara tingkah laku dan melestarikan budaya, cinta tanah air dan memberikan kontribusi pada perdamaian dunia.

Menurut Dubes, konstitusi di bidang pendidikan ini ditetapkan pada 1947 setelah Perang Dunia II. Namun setelah beberapa puluh tahun diterapkan, aturan ini mengalami beberapa kali amandemen.

"Setelah diamandemen ada unsur baru, seperti meningkatkan kreativitas dan kontribusi terhadap alam serta lingkungan. Selain itu, sebagai unsur yang baru, pendidikan tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di lingkungan keluarga dan komunitas," katanya.

Secara pribadi, Dubes Jepang berpendapat bahwa sebenarnya masalah pendidikan tidak hanya terletak pada melatih otak dan raga. "Otak dan raga yang sehat penting, tetapi yang lebih penting adalah melatih jiwa. Memelihara jiwa itu sama dengan memelihara kepercayaan diri dan semangat yang kuat," kata diplomat yang dulunya mengaku bukan siswa yang baik ini.

Dia juga menilai pendidikan yang baik adalah pendidikan yang mengedepankan kepentingan siswa dan mengembangkannya. Dalam konstitusi di bidang pendidikan, kata Dubes, kepentingan siswa sendiri menjadi bagian paling dasar. "Setelah mengedepankan kepentingan sendiri, baru mementingkan kepentingan orang lain," katanya.

Merasa bahwa Jepang mempunyai sumber daya alam (SDA) yang terbatas, Dubes Shiojiri menegaskan bahwa Jepang harus meningkatkan daya saingnya. "Oleh karena itu unsur pendidikan merupakan hal yang penting," katanya.

Dalam kesempatan itu, Dubes juga sempat memberikan nasihat kepada siwa-siswi Al-Azhar. Nasihat dia adalah, membaca buku sebanyak mungkin dan berinteraksi untuk menyempurnakan kepribadian, melakukan sesuatu yang baik dengan serius, serta jangan menduplikasi alias menjadi yang asli. "Jadilah profesional di bidangnya," katanya. (Suara Karya)

## 2. **TENAGA KERJA: Penempatan Calon TKI Dilayani Dua Lembaga**

Dua lembaga pemerintah kini melayani proses penempatan calon tenaga kerja Indonesia dalam satu kawasan berdekatan.

Petugas Balai Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BP3TKI) melayani berkas dari sedikitnya 100 pengelola pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta per hari.

Adapun petugas Subdirektorat Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri (PTKLN) Depnakertrans sudah melayani 50 pelaksana penempatan tenaga kerja Indonesia swasta (PPTKIS) sejak beroperasi sesuai Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 22/2008, Senin (2/2).

BP3TKI merupakan lembaga teknis di bawah Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI).

Berdasarkan pemantauan di Ciracas, Jakarta, Rabu (4/2), gedung kedua instansi berada di satu lokasi, dipisahkan tembok setinggi 3 meter.

Gedung BP3TKI berada di depan, sedangkan Subdirektorat PTKLN memakai gedung Balai Besar Pengembangan Latihan Ketransmigrasian Depnakertrans yang baru selesai dibangun. Menurut Direktur Eksekutif Migrant CARE Anis Hidayah, proses pengalihan kewenangan harus berjalan bertahap. Namun, proses ini harus segera diselesaikan agar tidak mengganggu pelayanan publik. "Presiden harus turun tangan. Bagaimana bisa satu fungsi dikerjakan dua institusi," ujarnya.

Migrant CARE mendukung pengalihan kewenangan ke pemerintah daerah. Namun, tambah Anis, pemerintah semestinya menyiapkan proyek percontohan di Jawa Barat, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat sebelum diimplementasikan menyeluruh.

Deputi Penempatan BNP2TKI Ade Adam Noeh mengatakan, BNP2TKI telah menyiapkan infrastruktur dan anggaran untuk proses penempatan calon TKI yang akan mubazir jika tidak dimanfaatkan.

Proses pemulangan TKI di Gedung Pendataan Kepulangan (GPK) Selapajang, Bandara Soekarno-Hatta, Banten, masih dikelola BNP2TKI. Kepala Satuan Pelaksana Pelayanan Kepulangan TKI GPK Selapajang AKB Rochman mengatakan, "Kami masih melayani pemulangan TKI."

Menurut Rochman pengalihan proses pemulangan dari Selapajang tidak mudah karena berkait dengan kontrak kerja bisnis yang berkait dengan GPK, antara lain, jasa angkutan, penukaran uang, dan petugas keamanan. (Kompas)

- |                            |          |                  |
|----------------------------|----------|------------------|
| <b>D. HANKAM</b>           | <b>:</b> | <b>Tidak Ada</b> |
| <b>E. HUKUM</b>            | <b>:</b> | <b>Tidak Ada</b> |
| <b>F. OLAH RAGA</b>        | <b>:</b> | <b>Tidak Ada</b> |
| <b>G. LINGKUNGAN HIDUP</b> | <b>:</b> |                  |

## 1. **DPR Belum Setujui Ratifikasi Konvensi Stockholm**

KOMISI VII DPR belum mau menyetujui usulan pemerintah untuk dapat meratifikasi Konvensi Stockholm tentang Bahan Pencemar Organik yang "persisten".

Dalam rapat kerja teknis persiapan ratifikasi Konvensi Stockholm antara pemerintah dengan Komisi VII DPR di Jakarta, Rabu (4/1) dewan menolak memberi izin pemerintah untuk melakukan ratifikasi dalam waktu dekat.

Dewan meminta pemerintah untuk menunggu hingga bulan Juli setelah selesai pelaksanaan Pemilu 2009.

"Terlepas bahwa ini bermanfaat, kita perlu tahu apa untungnya bagi Indonesia. Masalah ratifikasi ini penting tetapi kenapa tidak ada Menteri terkait yang hadir, berarti pemerintah menganggap ini tidak penting, jangan-jangan ratifikasi ini hanya untuk menambah catatan `rapot` bagi pemimpin pemerintahan saat ini untuk maju dalam Pemilu mendatang, jadi lebih baik ditunda saja sampai Juli," kata anggota Komisi VII DPR, Effendi Simbolon.

Effendi meminta pemerintah untuk memperjelas pengawasan peredaran pengawasan senyawa kimia di tanah air. Ia menganggap saat ini belum ada kejelasan siapa yang bertanggungjawab atas mudahnya berbagai senyawa kimia yang berbahaya beredar di masyarakat.

Anggota Komisi VII ini menyoroti masalah siapa yang bertanggungjawab atas pengawasan dalam penggunaan narkoba secara legal untuk kepentingan kedokteran, penelitian, maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sehingga dapat dipastikan zat-zat berbahaya tersebut tidak beralih tangan dan tersebar di masyarakat.

"Bisa dibayangkan bagaimana arsenik sebagai unsur kimia beracun dapat beredar bebas tanpa diketahui, sampai aktivis Munir terbunuh. Padahal itu senyawa sangat berbahaya, tidak ada warna, tidak ada bau, tidak ada rasa," kata Effendi.

Karena itu, ia meminta agar pemerintah benar-benar menunjukkan untung / ruginya Indonesia meratifikasi Konvensi Stockholm. Hal tersebut menjadi tidak berguna jika di dalam negeri pengawasan terhadap berbagai senyawa berbahaya itu tidak jelas.

Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup, Arief Yuwono, mengatakan, dengan meratifikasi Konvensi Stockholm ini secara politis diplomasi Indonesia di dunia akan semakin baik.

Selain itu, Indonesia akan mendapatkan dukungan fasilitas untuk mengatasi polutan organik yang persisten (POPs).(Jurnal Nasional)

## **2. Kebakaran Lahan Terindikasi Faktor Kesengajaan**

Kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah di Indonesia terindikasi kuat disengaja. Titik api di tengah kelembaban lahan yang tinggi di tengah musim hujan normalnya sulit terjadi.

Periode 1-28 Januari 2009 terdeteksi 1.205 titik panas di seluruh Indonesia. Sebagian besar titik api berada di Riau, 937 titik api atau 77,76 persen. "Ada indikasi kuat penyebabnya praktik pembakaran lahan," kata Forest Fire Coordinator WWF-Indonesia Dedi Hariri dalam keterangan khusus yang dikirim melalui surat elektronik, Rabu (4/2).

Indikasi kesengajaan membakar lahan juga diungkapkan Deputi V Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Penataan Lingkungan Ilyas Asaad. Pekan lalu, sejumlah anggota staf Kantor Menneq LH berada di Riau melihat kondisi lapangan. "Ada indikasi kesengajaan perusahaan selain perorangan. Kami terus selidiki itu," ujarnya.

Menurut Deni, fakta jumlah titik api pada Januari 2009 menjadi fenomena buruk. Tahun 2008, jumlah titik api di Indonesia berkurang hingga 79,20 persen dari patokan tahun 2006. Kondisi itu melampaui target 50 persen antara 2007 dan 2009.

Selama pembakaran lahan tak ditangani serius, ujarnya, kebakaran lahan dan hutan akan selalu terjadi setiap tahun.

Ilyas mengatakan, Kantor Menneq LH sedang mempertimbangkan tuntutan hukum bagi perusahaan yang terindikasi sengaja membakar. Ia yakin, melalui keseriusan pemerintah menuntut secara hukum pelanggaran lingkungan, efek jera akan didapat.

Berdasar data satelit NOAA-18 yang dikutip WWF-Indonesia, selain di Riau, titik api juga terdeteksi di Lampung, Sumsel, Sumbar, dan Kalbar. Berdasar data harian, jumlah titik api tertinggi terjadi pada 19-22 Januari, 209 titik. Titik api juga terdeteksi di Malaysia dan Timor Leste. (Kompas)

## **III. ARTIKEL :**

### **1. Putin, Rusia, dan WEC (oleh Reynaldo de' Archellie)**

The world is now facing the first truly global economic crisis, which continues to develop at an unprecedented pace.

Itu adalah kalimat pembuka pidato Perdana Menteri Rusia Vladimir Putin pada World Economic Forum (WEC) di Davos, Swiss.

Putin, bersama pemimpin China—Wen Jiabao—mendapat kesempatan menyampaikan pidato pembukaan pada forum yang dihadiri para petinggi negara dan perusahaan tingkat dunia. Dalam pidato itu, Putin mewakili kepentingan pemerintahnya, paling tidak menyampaikan beberapa pesan penting kepada dunia terkait posisi Rusia saat ini.

Mengapa?

Namun, yang lebih penting untuk disimak adalah alasan mengapa Putin mendapat kesempatan berpidato pada forum yang pernah disaini World Social Forum (WSC) ini. Mengapa bukan Presiden AS terpilih Barack Obama yang tampil perdana di hadapan forum?

Pertama, Rusia adalah salah satu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi yang positif dalam satu dekade belakangan. Pertumbuhan ekonomi Rusia rata-rata 7,0 persen per tahun sejak Putin menjabat presiden. Negara lain yang menyaingi Rusia adalah China. Namun, pertumbuhan ekonomi Rusia lebih banyak disebabkan windfall profit sektor ekspor energi, yakni minyak dan gas bumi. Pada tahun 2009, pemerintah dan analis berpendapat, pertumbuhan Rusia akan mengalami penurunan sebagai dampak krisis ekonomi global yang sedang berlangsung.

Kedua, terkait pertumbuhan ekonomi, Rusia merupakan mitra strategis alternatif bagi negara-negara dunia, khususnya Eropa, dalam sektor energi. Meningkatnya konstelasi politik Timur Tengah membuat negara-negara Eropa berusaha mencari sumber energi alternatif lain selain minyak bumi, yaitu gas alam. Kini Rusia merupakan negara dengan cadangan gas alam terbesar di dunia. Bahkan, untuk minyak bumi pun, Rusia ada di posisi kedua setelah Arab Saudi. Jadi, wajar jika sebagian besar negara Eropa menggantungkan kebutuhannya kepada Rusia. Tentang perselisihan Rusia-Ukraina terkait harga gas baru-baru ini, Putin secara implisit menyebutkan, sudah saatnya dunia menciptakan sistem baru, mungkin sejenis OPEC, untuk sektor gas demi menjamin keamanan energi global.

#### **Dampak krisis**

Pertumbuhan ekonomi yang diraih Rusia beberapa tahun belakangan bukan berarti membuat negara ini lepas dari dampak krisis ekonomi global saat ini. Rusiaprofile.org menyebutkan, paling tidak 1,5 juta orang di Rusia kehilangan pekerjaan dalam beberapa bulan terakhir. Putin dalam pidatonya menyebutkan, program kebijakan telah disiapkan Pemerintah Rusia guna meminimalisasi dampak krisis di Rusia dengan cara: mendorong konsumsi massal, menyediakan jaminan sosial bagi masyarakat, dan mengusahakan penciptaan lapangan kerja baru.

Resolusi Putin untuk menahan dampak krisis global di Rusia secara tegas ia generalisasi untuk persoalan yang dihadapi dunia saat ini, tidak saja untuk sektor ekonomi, tetapi juga untuk sektor lain. Untuk sektor ekonomi, Putin tidak menyalahkan siapa pun, perusahaan, atau negara mana pun sebagai penyebab krisis global. Putin secara bijak mengajak para peserta forum menjadikan sejarah sebagai modal untuk melangkah ke depan. Peristiwa serupa yang terjadi tahun 1920-an dan 1930-an merupakan pengalaman reflektif dalam menghadapi krisis kali ini.

Lalu, Putin menganjurkan negara-negara di dunia untuk menciptakan sistem cadangan devisa alternatif, tidak lagi terlalu bergantung pada satu jenis mata uang, dollar. Selain itu, Putin juga mengajak peserta forum untuk membangun sebuah sistem perekonomian global yang didasarkan kerja sama antarkutub ekonomi, tidak terfokus pada satu kutub ekonomi, yang menurut Putin sudah ketinggalan zaman.

Sektor keamanan energi global menjadi perhatian khusus Putin. Ia mengajak negara-negara di dunia untuk membangun kesepakatan tentang sistem global yang dapat menjamin keamanan pasokan energi. Putin secara implisit mencontohkan krisis Rusia-Ukraina baru-baru ini sebagai bentuk tidak adanya kesepakatan karena tidak adanya regulator yang legitimatif yang dapat mengakomodasi kepentingan semua pihak yang terlibat.

Menindaklanjuti hal ini, Putin menawarkan proposal kerja sama strategis bagi negara mana pun untuk sektor energi. Saat ini, paling tidak Rusia tengah membangun jalur pipa gas alternatif: South Stream, jalur pipa gas menuju Bulgaria melalui Laut Hitam; Nord Stream, menuju Jerman melalui Laut Baltik; Yamal-Europe dan Blue Stream, menuju Turki; dan jalur lain yang menghubungkan Siberia dengan Samudra Pasifik.

#### **Krisis Palestina-Israel**

Pada bagian lain, Putin juga mengomentari krisis Palestina-Israel sebagai akibat lemahnya peran organisasi internasional dalam menghasilkan solusi konstruktif untuk konflik regional. Kecenderungan yang terjadi saat ini, menurut Putin, banyak persoalan global yang diselesaikan secara unilateral oleh pihak-pihak tertentu. Namun, Putin secara eksplisit tidak menyebutkan pihak mana yang dimaksud.

Untuk itu, Putin mengajak semua pemimpin negara untuk kembali memikirkan bagaimana memperbaiki sistem hubungan internasional, menjadikannya lebih efektif, aman, dan stabil.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan, pesan penting yang ingin disampaikan Putin dalam pidatonya di WEC adalah sebuah kritik terhadap lemahnya peran lembaga-lembaga internasional dalam menghasilkan solusi konstruktif bagi permasalahan-permasalahan regional dan global. Setiap krisis yang terjadi, entah sektor ekonomi, sosial, politik, maupun energi, tidak lain disebabkan tidak adanya kesepakatan antarnegara dalam wadah internasional yang efektif dan stabil.

Dunia tidak lagi dapat dikendalikan oleh satu kekuatan secara unilateral. Multilateralisme sistem hubungan internasional adalah solusi dalam mengatasi aneka permasalahan global saat ini. (Kompas)

## 2. **Kebijakan Proteksionisme Strategis Diperlukan (Oleh Naomi Siagian)**

Pemerintah Indonesia perlu menerapkan kebijakan proteksionisme yang strategis dan berjangka panjang.

Penguatan domestik tidak bisa dilakukan sepotong-sepotong dan sementara. Direktur Eksekutif Institute for Global Justice (IGJ) Bonny Setiawan mengatakan, Indonesia masih lemah dalam memproteksi industri dan pertanian lokal. "Negara maju saja masih melakukan proteksi dalam kaitan manajemen krisis, yang sewajarnya tidak perlu diterapkan lagi. Tapi, Indonesia yang merupakan negara sedang tumbuh tidak bisa melindungi dan memperkuat pasar domestiknya," tegas Bonny, Rabu (4/2). Dia mengatakan, rencana Amerika Serikat (AS) mengeluarkan RUU Paket Stimulus yang di dalamnya berisi pasal "Buy American", sah-sah saja dalam mengatasi krisis. Hal serupa juga akan banyak dikeluarkan banyak negara.

Pasal tersebut melarang penggunaan dana stimulus untuk membeli baja, besi atau barang pabrik lain untuk pembangunan infrastruktur dari luar negeri. Hal serupa juga dilakukan banyak negara. Bonny mengakui, kebijakan itu akan mempersulit produk ekspor Indonesia ke AS. Ekspor Indonesia akan lebih rendah dan sekarang ini sudah tergerus akibat krisis ekonomi. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat juga mengatakan, dalam kebijakan proteksi, pemerintah sangat lemah. Bahkan instrumen proteksi yang diperkenankan oleh WTO juga kurang dimanfaatkan pemerintah. Dia mencontohkan, pengajuan safeguard produk TPT tidak diberikan pemerintah. Sementara itu beberapa negara seperti, seperti Mesir, Brasil dan Turki sudah menerapkan bea masuk safeguard untuk memblokir masuknya produk impor. Dia menyayangkan Pemerintah Indonesia yang sangat bebas dalam perdagangan TPT. Bea masuk hanya 5-10 persen. Tetapi meskipun bea masuk rendah dan impor TPT diperketat, kenyataannya masih banyak produk impor ilegal.

Dia juga menilai kebijakan proteksi AS bisa menjadi contoh bagi negara lain untuk melindungi pasar domestiknya. Semua negara akan ofensif terhadap produk impor, terutama yang sudah diproduksi di dalam negeri.

"Saya tidak tahu apakah produk TPT akan masuk dalam skema proteksi di AS. Yang pasti kalau itu diberlakukan, itu akan melemahkan ekspor Indonesia," kata Ade. Dia berpandangan, AS mungkin sulit menerapkan proteksi untuk produk TPT sebab produk TPT AS lebih ditujukan untuk pasar high end. Produk murah pun mengandalkan dari impor. China dianggap akan paling keberatan dengan kebijakan proteksi AS tersebut karena pasar AS saat ini didominasi oleh impor dari China.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Asosiasi Pengusaha Baja dan Besi Indonesia (Indonesian Iron and Steel Industry Association/IISA) Hidayat Triseputro mengatakan, untuk produk besi baja, Indonesia sudah tidak mengekspor ke AS. Hidayat mengatakan, selama ini AS sangat proteksionis terhadap pasar baja domestiknya dengan menerapkan bea masuk yang tinggi.

"Dulu Indonesia memang sempat ekspor besi baja ke AS. Tapi sekarang produk besi baja Indonesia sudah tidak kompetitif masuk ke pasar AS. Kita lebih banyak ke pasar Asia," kata Hidayat ketika dihubungi terpisah. (Sinar Harapan)

## 3. **Rohingyas are not just migrants (by SK Tjahjono)**

It is strange that the Myanmar regime was willing to take certain "measures" as regards the Rohingya while at the same time denied the refugees are from Myanmar.

Indonesia can deport them or do as it likes but it will be unfair to dismiss their plight as simply fleeing the country for economic reasons. No one in their right mind would have risked their life and set out on dangerous seas in rickety boats if not out of utter desperation.

In general, human rights abuses are rampant in Myanmar. Muslims in general are subject to institutionalized discrimination and the Rohingyas are the most sought out target. In 2006 in his article titled "The Outsider" Harry Priestley wrote, "In a country where discrimination against minority groups is a fact of life, Muslims are bottom of the heap".

It is a fact that the Muslims in Myanmar are not recognized as full- fledged Burmese. They are officially termed Indian Burmese, Chinese Burmese on their identification cards, if one is issued, although they have lived in the country for generations. The case of Rohingyas is worse because they are not even entitled to identification cards. The Washington-based Human Rights Watch in its 2002 report also said "In Arakan State, a predominantly Muslim area, human rights violations, including forced labor, restrictions on the freedom of movement, and the destruction of mosques, have been commonplace."

Violence against Rohingya Muslims in Arakan is a way of life, according to UN staff based in camps for Rohingya refugees in Bangladesh. As opposed to other parts of Burma, however, in Arakan the violence against Muslims is carried out systematically by the Burmese army. The persistent abuse of human rights in Arakan, including institutionalized discrimination and forced labor has been documented by the Human Rights Watch and others.

The condition has worsened over the years, particularly after the 2007 saffron revolution. But the regime will do what it does best; deny the truth and lie to the world that everyone is well treated and well fed. We have seen how systematically and consistently it has abused even "ethnic Burmese". What are a few hundred of these stateless and hungry people to the regime?'

It is anyone's guess what the fate of these Rohingas will be if they are repatriated but this should not be a case for guessing. Indonesia and India have already shown them an act of kindness by rescuing them. It is hoped the U.N. or other NGO refugee organizations could look into the matter so that at least the safety of these desperate people can be assured. (The Jakarta Post)

**IV. LAIN-LAIN : Tidak Ada**

**V. EDITORIAL :**

**1. Tragedi Manusia Rohingnya**

Keberadaan pengungsi mengindikasikan terjadinya kejahatan terhadap nilai-nilai dan prinsip-prinsip kemanusiaan universal.

Tulisan pendek ini sengaja dimulai dengan mengutip pendapat ahli hukum internasional asal Inggris, R Yewdall Jennings. Apakah pendapat Yewdall Jennings itu menemukan kebenaran dalam kasus pengungsi suku Rohingnya dari Myanmar yang belakangan ini mengalir ke beberapa negara termasuk Indonesia?

Laporan Amnesti Internasional menjawab pertanyaan itu. Menurut laporan Amnesti Internasional, suku Rohingnya terus-menerus didera penderitaan dan hak-hak asasi mereka dilanggar sejak junta militer berkuasa di Myanmar tahun 1978. Sejak itu, tak kurang dari 200.000 orang Rohingnya mengungsi ke Banglades.

Berita-berita di media massa mengisahkan, para pengungsi Rohingnya menggunakan perahu, mengarungi lautan, mencari negeri yang akan memberikan kehidupan yang lebih baik dan aman. Apakah harapan mereka kesampaian?

Ada yang lebih dulu dijempit kematian ketika masih terombang-ambing ombak di laut. Lebih dari 500 orang dikhawatirkan tenggelam di laut sejak awal Desember lalu setelah perahu mereka ditarik ke laut oleh tentara Thailand, ketika hendak mendarat di negeri Gajah Putih itu.

Apa yang dialami orang-orang Rohingnya itu ibarat memutar ulang kisah manusia perahu dari Vietnam dan manusia gunung dari Afganistan. Mereka mengungsi, meninggalkan kampung halamannya untuk melepaskan diri dari kekejaman perang dan kehidupan yang lebih layak.

Tidak semua harapan itu terpenuhi. Itu karena banyak di antara mereka tidak menemukan apa yang mereka cari di negeri baru atau bahkan harus menanggung derita berbulan-bulan, bertahun-tahun, sebelum mendapat negeri baru. Yang lebih tragis, mereka dijempit maut dalam perjalanan menuju negeri baru.

Pernyataan junta Myanmar, seperti dikutip kantor berita Reuters, menambah tragis nasib suku Rohingnya. Dinyatakan bahwa Rohingnya bukan termasuk satu dari lebih dari 100 ras nasional yang menyatu menjadi Uni Myanmar. Lalu siapa mereka? Bukankah mereka sudah berada di wilayah Myanmar sejak abad ke-7?

Di sinilah bermula pelanggaran prinsip-prinsip kemanusiaan universal. Hal itu terjadi karena keadaban publik di mana mereka hidup telah hilang. Orang dengan gampang berpaling dari penderitaan orang lain karena merasa penderitaan orang lain bukan menjadi persoalan dan tanggung jawab mereka.

Kini, apakah kita juga tidak akan peduli terhadap nasib mereka? Masalah Rohingnya ini sebetulnya dapat dijadikan jalan oleh Pemerintah Indonesia untuk kembali berperan positif dalam upaya pemeliharaan perdamaian dunia.(Kompas)

**Jakarta, 5 Pebruari 2009**  
**Sub Direktorat Berita**  
**Direktorat Informasi dan Media**  
**Deplu**